

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEBERSIHAN DALAM PENGOLAHAN SAMPAH DI KECAMATAN  
BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



Oleh :

**DEBY EDIA PUTRI**

**NPM : 177310325**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Deby Edia Putri  
Npm : 177310325  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 11 November 2021

Turut Menyetujui :

Pembimbing

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

**Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Deby Edia Putri  
NPM : 177310325  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Penelitian : Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Maret 2022

Ketua



**Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si**

Sekretaris



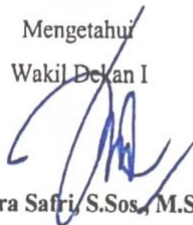
**Septa Juliana, S.Sos., M.Si**

Anggota



**Rizky Setiawan, S.IP., M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR 096/UIR-FS/KPTS/2022  
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
  2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
  3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
  4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
  5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Deby Edia Putri
N.P.M	: 177310325
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

**Struktur Tim :**

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si   | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Septa Juliana, S.Sos., M.Si       | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si       | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP. | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 29 Desember 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK : 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sek. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip —sk penguji—

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

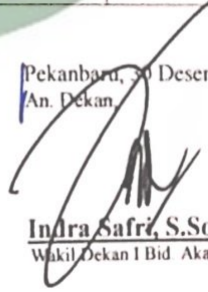
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 0094/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 29 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Desember 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Deby Edia Putri  
NPM : 177310325  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 82,5 " ; Huruf : " A- "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Riski Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Desember 2021  
An. Dekan

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si.  
Wakil Dekan I Bid Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

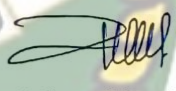
Nama : Deby Edia Putri  
NPM : 177310325  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan  
Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota  
Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 22 Maret 2022  
An. Tim Penguji  
Sekretaris

Ketua

  
Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

  
Septa Juliana, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

  
Indta Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program  
Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul: **“Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”** Tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari pada beberapa lembaran tertentu dari naskah Proposal ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal tersebut penulis berharap memaklumi serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial & Politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan sarans dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

4. Ibuk Dr. Sri Maulidiah., S.Sos., M.Si selaku pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini.
5. Terimakasih Kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Bapak dan Ibu seluruh staff serta karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah yang telah membantu penulis khususnya dalam administasi.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada Orangtua penulis, Papa dan Mama yang selalu mendo'akan dan memberi semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis sampai dititik sekarang ini.
8. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah mau perjuang dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir, dan terimakasih juga untuk sahabatku Aisyah yang selalu menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis dan terimakasih selalu ada disaat penulis membutuhkan.
9. Terimakasih Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 terutama terkhusus untuk sahabat-sahabat seperjuangan Memey, Sanah, Gadis, Yola, dan Ulva yang sudah



memberikan semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dan selalu ada kapanpun menemani penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini, penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Aamiin.

Pekanbaru, 15 November 2021

Penulis

DEBY EDIA PUTRI

NPM : 177310325

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	23
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	24
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
2.1 Studi Kepustakaan.....	26
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	26
2. Konsep Fungsi Pemerintahan.....	33
3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	35
4. Konsep Kebijakan.....	36
5. Konsep Kinerja.....	38
6. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	39
7. Konsep Lingkungan.....	42
2.2 Penelitian Terdahulu.....	44

2.3 Kerangka Pikir.....	45
2.4 Konsep Operasional.....	46
2.5 Operasional Variabel.....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Tipe Penelitian.....	52
3.2 Lokasi Penelitian.....	53
3.3 Key Informan dan Informan.....	54
1. Key Informan.....	54
2. Informan.....	54
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	56
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	57
1. Sumber Data Primer.....	57
2. Sumber Data Sekunder.....	58
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.7 Teknik Analisa Data.....	59
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	59

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Keadaan Geografis.....	61
1. Letak dan Luas.....	61
2. Iklim.....	62
4.2 Pemerintahan.....	62
4.3 Penduduk.....	62
4.4 Sosial.....	63



1. Pendidikan.....	63
2. Pertanian.....	63
3. Industri.....	63
4. Perhubungan dan Komunikasi.....	64
4.5 Sejarah Lokasi Penelitian.....	64
4.6 Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Raya.....	65
4.7 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.....	66
4.8 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan .....	67
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Nama dan Identitas Informan.....	70
5.2 Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	71
1. Efektifitas.....	71
2. Efisiensi.....	75
3. Kecukupan.....	79
4. Perataan.....	82
5. Responsivitas.....	86
6. Ketepatan.....	89
5.3 Faktor-Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh DLHK Dalam Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	92

## BAB VI PENUTUP

1. Kesimpulan.....94
2. Saran.....95

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku.....97
2. Jurnal.....102
3. Dokumentasi.....103



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.2 Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Di Kota Pekanbaru.....	19
11.1 Penelitian Terdahulu.....	44
11.3 Operasional Variabel Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	49
111.1 Keadaan Key Informan dan Informan.....	55
111.2 Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	60
V.1 Nama dan Identitas Responden.....	70



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Paradigma Pengelolaan Sampah Konsep 3R.....	14
11.2 Kerangka Pemikiran Mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.	
2. Daftar Draf Wawancara untuk Pihak Kecamatan Bukit Raya Dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.	
3. Daftar Rekapitulasi Hasil Wawancara Penelitian Dengan Judul “Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”.	
4. Surat Rekomendasi Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/43520 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/PraRiset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
5. SK Dekan Fisipol Uir Nomor. 317/UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi.	
6. Surat Keterangan Jurnal Online.	
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.	
8. Sertifikat Baca Al-Qur’an.	

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Universitas Islam Riau Peserta Ujian Penelitian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Deby Edia PUTRI  
NPM : 177310325  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Penelitian : Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Maret 2022

Pelaku Pernyataan,



Deby Edia Putri



## Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

### ABSTRAK

Deby Edia Putri

177310325

Permasalahan penelitian ini adalah mengapa Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R Kota Pekanbaru di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) tidak berjalan semestinya, dan dimana masih terdapat masyarakat yang kurang akan kesadaran diri terhadap sampah dilingkungannya. dan apa saja hambatan-hambatan hasil Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi dari Wiliam N. Dunn. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu Kualitatif deskriptif, dengan penetapan informan melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan melalui obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah sudah terlaksana cukup baik sudah mulai dengan ketentuan namun masih terbatas. Dari enam Indikator yang diteliti terdapat indikator *efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan*. Dari enam indikator yang diteliti terdapat indikator *efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan*, sementara indikator *responsivitas* belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kemudian agar kendalanya tidak meningkat evaluasi kinerja dalam pengolahan sampah harus dengan memaksimalkan kinerja dan sosialisasi terhadap masyarakat dan selalu mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan sampah.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Pengolahan Sampah, DLHK, Camat

*Performance Evaluation of the Environmental and Hygiene Service in Waste Management in Bukit Raya District, Pekanbaru City*

**ABSTRACT**

*Deby Edia Putri*

177310325

*The problem of this research is why the Pekanbaru City Government Policy in Waste Management with the Pekanbaru City 3R Concept at the Environmental and Hygiene Service (DLHK) does not work properly, and where there are still people who lack self-awareness of waste in their environment. and what are the obstacles to the results of the Environmental and Hygiene Service Performance Evaluation in Waste Management in Bukit Raya District, Pekanbaru City. This study aims to determine the results of the Performance Evaluation of the Department of Environment and Hygiene in Waste Processing in Bukit Raya District, Pekanbaru City. This study uses the Evaluation Theory of William N. Dunn. The research method that I use is descriptive qualitative, with the determination of informants through purposive sampling technique. Collecting through observation, interviews, and documentation. The results of the research that the Performance Evaluation of the Environmental and Hygiene Service in Waste Processing has been carried out quite well, starting with provisions but still limited. Of the six indicators studied, there are indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. Of the six indicators studied, there are indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy, while the indicators of responsiveness are not as expected due to lack of public awareness of waste so that there are still many people who litter. Then so that the obstacles do not increase, performance evaluation in waste processing must maximize performance and socialize to the community and always support activities related to waste processing.*

**Keywords:** *Performance Evaluation, Waste Management, DLHK, Camat*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk kesatuan dan republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam UUD 1945. Dimana dalam isinya yaitu dikatakan bahwa, keberadaan Negara Indonesia tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Negara menurut Kranenburg (dalam Syafiie 2010 : 79).

Oleh karena itu, sebagai suatu negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang didalam pembahasan perundang-undangan yang dibahas pada Dasar Negara dimana dalam pembahasan tersebut khususnya pada alinea Ke-Empat yaitu berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.



Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang diharapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan dari pada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Ndraha (2003:7) bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil*. Oleh karena itu adanya sebuah pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara Berdaulat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia yang di tetapkan dalam perundangan tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang ada di daerah diperuntukkan untuk mempercepat pelaksanaan perwujudan pembangunan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri, peningkatan daya saing antara masing-masing daerah, pemerataan pembangunan, pelaksanaan keadilan terhadap seluruh rakyat Indonesia, tentunya dalam peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dimana dalam melaksanakan penelitian pada pembahasan yang penulis susun, penulis mencoba melakukan penelitian dengan melibatkan Pemerintah di Kota Pekanbaru, khususnya Dinas DLHK Kota Pekanbaru, dimana DLHK memiliki fungsi untuk menjalankan kebijakan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Selain dari pada hal tersebut, berdasarkan Perwako yang dibuat dengan Nomor Urut 103/2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pemerintah Kota, adapun Tugas Dan Fungsi Dari Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut ini:

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Bab IV Pasal 4 disebutkan bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup. Kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya.
2. Perangkat Pemerintah DLHK Pekanbaru dibebankan tugas yaitu untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah Provinsi Riau. DLHK dalam menjalankan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kegiatan teknis pada bidang lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Pekanbaru.
  - b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan di bidang kegiatan kerja DLHK.

- c. Merealisasikan kegiatan yang menjadi kerja pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- d. Melakukan Pekerjaan dalam menyusun serta merencanakan teknis pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan DLHK.
- e. Penyelenggaraan dibidang pelayanan masyarakat dan pelayanan teknis dibidang DLHK.
- f. Menjalankan kegiatan pada pada bidang kehutanan, serta bidang konservasi alam dan hayati serta ekosistemnya.
- g. Penetapan serta pengesahan naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- h. Pembinaan dan pengesahan naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- i. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam konteks DLHK.
- j. Pemberian arahan serta proses binaan di lingkungan DLHK Kota Pekanbaru.
- k. Pengelolaan Keuangan Dinas.
- l. Pelaksanaan pekerjaan lainnya sesuai dengan porsi yang dimiliki oleh Dinas DLHK Pebambaru.

Dari 12 (dua belas) fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yang terkait dengan masalah pengolahan sampah konsep 3R adalah pada penetapan, pengawasan, pengendalian, pengolahan sampah bidang lingkungan hidup dan kebersihan.



Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru:

1. Perumusan Kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan pengaduan dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
3. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.
4. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.
6. Perumusan pembentukan tim *koordinasi* dan *monitoring* penegakan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
7. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pengakuan keberadaan dan peningkatan kapasitas masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup.

9. Pengembangan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.
10. Pengembangan dan menyelenggarakan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup.
11. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan.
12. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dari uraian tugas diatas telah dijelaskan ada 13 (Tiga Belas) fungsi uraian tugas pokok dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Dan adapun bidang-bidang program yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini membahas tentang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Bidang Tata Lingkungan, fungsi dari Bidang Tata Lingkungan adalah:
  - a. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan Evaluasi kajian Lingkungan Hidup Strategis dimana pelaksanaan ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru.
  - b. Menjalankan proses koordinasi dalam instrumen pencegahan sebuah bencana seperti pencemaran dan kehancuran lingkungan khususnya di Kota Pekanbaru.
2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan yang memiliki fungsi:

- a. Penyusunan Bahan Kebijakan dan Pengembangan Pedoman instrument serta melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kerusakan dilingkungan (lingkungan hidup) ataupun resiko pada kerusakan lingkungan hidup.
3. Bagian dari Tugas Bidang Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - a. Melakukan Proses Pemantauan Kualitas Lingkungan seperti Udara, Tanah, Air.
  - b. Pelaksanaan Pemantauan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran.
  - c. Menjalankan proses sosialisasi serta mutu dari kondisi lingkungan. (Air, Udara, Tanah). Khususnya di Kota Pekanbaru.
  - d. Melaksanakan Bimbingan teknis pengendalian pencemaran air, Udara, Tanah serta limbah bahan berbahaya dan beracun kepada usaha kegiatan.
4. Seksi Pemantauan Lingkungan.
  - a. Perencanaan dan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara.
5. Tugas dari SDM Penataan serta peningkatan Kualitas Hidup.
  - a. Pengembangan system informasi, menerima saran dan kritik dari masyarakat atas kegiatan-kegiatan yang terjadi dilingkungan mereka khususnya terkait dengan proses atau kegiatan yang tidak memiliki izin.
6. Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan.



- a. Pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi lingkungan hidup DLHK Pekanbaru.
  - b. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan system informasi lingkungan hidup berbasis web.
  - c. Perencanaan, penyiapan bahan dan penerbitan majalah informasi lingkungan.
7. Seksi Pelaksanaan Hukum.
- a. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan melaksanakan penegakan proses hukum dan perlindungan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencemaran ataupun kegiatan yang merusak lingkungan hidup khususnya di kawasan Kota Pekanbaru yang ramai terhadap lingkungan masyarakat.

Pengolahan sampah dilakukan melalui pendekatan berbasis 3R dan berbasis masyarakat, pengolahan sampah secara terpadu dengan melaksanakan pengolahan sejak dari sumbernya. 3R adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) dan mendaur ulang sampah (*recycle*).

Berdasarkan yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengolahan sampah dapat berjalan secara proporsional. Pengolahan sampah pada Bab 1 pasal 1 ayat 3 bahwa pengolahan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, berkelanjutan yang terdiri dari kegiatan pengurangan dan penanganan. Proses pengurangan

merupakan upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut dan diproses ditempat pemrosesan akhir sampah. Menurut Undang-undang No. 18 tahun 2008 pasal 2 tentang pengolahan sampah, terdapat 2 kelompok utama pengolahan sampah, yaitu:

- a. Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (*R1*), guna ulang (*R2*), dan daur ulang (*R3*).
- b. Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari:
  1. Penilaian: dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
  2. Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
  3. Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
  4. Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

Undang-undang No.18 tahun 2008 ini menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan (*treatment*) maupun pengurangan (*landfilling*). Pengurangan sampah melalui 3R menurut Undang-undang No. 18 tahun 2008 meliputi:

- a. Pembatasan (*Reduce*): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sedikit mungkin.
- b. Guna ulang (*Reuse*): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung.
- c. Daur ulang (*Recycle*): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan, dalam secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi ketiga pendekatan tersebut merupakan dasar utama dalam pengolahan sampah, yang mempunyai sasaran utama limbah yang harus dikelola dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan, baik melalui tahapan pengolahan maupun melalui tahapan pengurusan terlebih dahulu, akan menjadi sedikit mungkin dan dengan tingkat bahaya sedikit mungkin. Gagasan yang lebih radikal adalah melalui konsep kegiatan tanpa limbah (*zero waste*). Secara *teoristis*, gagasan ini dapat dilakukan, tetapi secara praktis sampai saat ini belum pernah dapat direalisasikan. Oleh karenanya, gagasan ini lebih ditonjolkan sebagai semangat dalam pengendalian pencemaran limbah, yaitu agar semua kegiatan manusia hendaknya berupaya untuk meminimalkan terbentuknya limbah atau meminimalkan tingkat bahaya dari limbah, bahkan kalau mungkin meniadakan konsep pembatasan (*reduse*, jumlah sampah yang akan terbentuk dapat dilakukan antara lain melalui efisiensi penggunaan sumber daya alam. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang



sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempertegas fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah merupakan bagian dari pelayanan publik dan pengolahan sampah termasuk pada pembagian urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sub urusan yaitu persampahan dimana dinyatakan bahwa pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman Pengolahan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengolahan sampah termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08

Tahun 2014 tentang pengolahan sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 5 No. 08 Tahun 2014 tentang tugas pemerintah daerah dalam pengolahan sampah meliputi:

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah.
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah.
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
- d. Melaksanakan pengolahan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dinamika pembangunan Kota Pekanbaru yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat, pertumbuhan penduduk, industri, investasi dan perdagangan yang pesat di Kota Pekanbaru menghasilkan sampah domestik dengan jumlah sampah 836,867 kg per bulan jika pertahun dengan data yang peneliti temukan saat penelitian tercatat dari tahun 2018

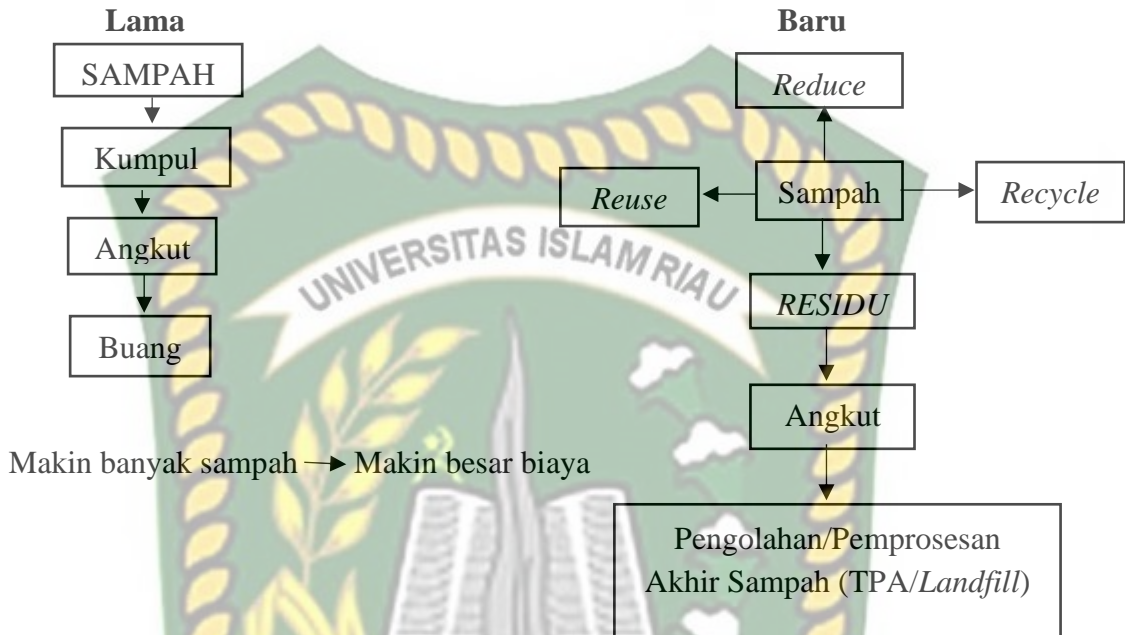
sebanyak 1.006 ton, tahun 2019 sebanyak 1.029 ton dan di tahun 2020 sebanyak 1.052 ton. Dengan jumlah sampah timbullah sampah sedemikian banyak, maka kondisi lingkungan Kota Pekanbaru khususnya pemukiman masyarakat masuk dalam kategori permasalahan kebersihan yang kompleks. Artinya perlu penanganan yang cepat, tepat, cermat, maju dan terarah dari pemerintah daerah melalui kebijakan sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Kegiatan pengurangan sampah dapat berupa pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, dimana proses penilaian merupakan kegiatan penunjang pokok dari proses daur ulang. Kegiatan penanganan penilaian sesuai dengan jenis dan sifatnya, pengumpulan dari sumber ke TPS, pengangkutan dari sumber ke tempat pemrosesan. Berbagai sistem daur ulang dapat diaplikasikan, karena komposisi sampah terbesar di Kota-kota di Indonesia sebagian besar adalah sampah organik, untuk pemanfaatan kembali sampah baik organik maupun anorganik adalah dengan cara diperkenalkannya Konsep 3R. Untuk pengurangan sampah diperkenalkannya teknik-teknik sederhana seperti mengurangi kemasan, kembali pada pembungkus yang dapat terdegradasi. Untuk itu pengolahan sampah sistem 3R (*reuse, reuse, recycle*), melalui pengumpulan, pemilahan, pengolahan sampah oleh masyarakat harus terus digalakan.

Untuk itu setiap Kecamatan/Kota melakukan mekanisme pengangkutan sampah secara langsung dari masyarakat ke TPS dengan paradigma pengelolaan sampah konsep 3R berikut ini:



### 1.1 Paradigma Pengelolaan Sampah Konsep 3R



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2020

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan/Kota dalam pengangkutan sampah dari masyarakat pada paradigma pengangkutan sampah yang digambarkan diatas terlihat dari pengumpulan sampah yang dilakukan dari pengumpulan sampah yang sudah dikumpulkan dan dibuang ke TPS terdekat dan selanjutnya mekanisme pengangkutan sampah diserahkan kepada DLHK Kota Pekanbaru. Melihat paradigma pengelolaan kerja seperti ini, sampah seharusnya tidak lagi menjadi permasalahan krusial yang merisaukan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 tentang pengolahan sampah, selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengolahan sampah

yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 tentang pengolahan sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. DLHK mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang peningkatan kebersihan, berdasarkan peraturan daerah Pasal 27 No. 08 Tahun 2014 menjelaskan tentang TPS 3R sebagai berikut:

- a. TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c untuk wilayah pemukiman disediakan oleh pemerintah kota.
- b. Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS 3R di kawasan pemukiman.
- c. Pengelola kawasan menyediakan TPS 3R di kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- d. TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 harus memenuhi kelayakan dari aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai berikut:
  1. Memperhatikan aspek geologi dan tata lingkungan sekitar.
  2. Memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
  3. Memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan
  4. Memperhatikan ketersediaan lahan.

5. Dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan, dan
6. Dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dengan menggerakkan unsur komponen masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang *efektif* dan *efisien*, permasalahan sampah di Kota Pekanbaru menjadi fokus Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terus mencari solusi dan formula yang mumpuni. Untuk itu, DLHK terus gencar menangani permasalahan sampah dengan menggunakan basis TPA, TPS, Bank Sampah serta penanganan sampah disumbernya. Kepala DLHK mengatakan, penanganan sampah dengan berbagai strategi dan cara tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat mengatasi dampak rusaknya lingkungan akibat sampah yang masih banyak ditempat-tempat yang tidak seharusnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang nantinya akan menjadi dinas yang membidangi pengelolaan sampah agar mempunyai inovasi dan terobosan dalam pengolaan sampah, seharusnya DLHK bisa lebih *inovatif* dengan membuat tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang cukup banyak di setiap desa ataupun kelurahan, sehingga nantinya truk sampah tinggal mengambil sampah di setiap TPS tanpa harus masuk pemukiman DLHK nantinya harus membenahi pekerjaan rumah sampah ini. Penyebab sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama didaerah perkotaan, sampah apabila tidak ditangani dengan baik dari



sumber sampah maka akan menimbulkan masalah terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan keindahan.

Persoalan sampah di Kota Pekanbaru mendapat momentum dipertengahan Tahun 2016 lalu dimana terjadi demonstrasi yang mengakibatkan Kota Pekanbaru menjadi “Kota Sampah” dimana hampir di setiap ruas jalan termasuk jalan protokol di penuh dengan sampah organik dan anorganik. Sejumlah warga melakukan aksi demo kantor Wali Kota Pekanbaru dan sejumlah kantor lurah bahkan, ada juga yang melakukan aksi blokir jalan, selain itu di temukan juga fakta bahwa akar masalah sampah di Kota Pekanbaru yang sering mendapat Piala Adipura dan Kota Terbersih dan Rapi Se-Indonesia di karenakan para buruh dan pekerja sampah melakukan aksi mogok.

Penerapan sampah dengan Konsep *3R* (*reuse, reduce, dan recyle*) dapat dijadikan solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara yang sangat mudah dan murah. Sampah yang di olah dapat dijadikan sebagai pupuk kompas atau bahkan bisa menjadi sumber listrik baru. Penerapan Konsep *3R* ini dapat di terapkan oleh siapa saja setiap hari. Konsep ini memiliki inti yakni:

*Reuse* (Menggunakan Kembali Sampah yang masih bisa di gunakan dan bisa berfungsi lainnya) contoh sampah *Reuse* adalah:

1. Menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis, *reduce* (Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan memunculkan sampah).
2. Membeli/menjual baju *preloved* sehingga mengurangi sampah pakaian.

3. *Revamp* barang lama yang ada dirumah dan tambahkan sedikit Kreativitas untuk menjadi barang baru yang bermanfaat.

*Reduce* (Mengurangi penggunaan bahan-bahan yang merusak lingkungan).

Contoh sampah *Reduce* adalah:

1. Mengurangi penggunaan tisu dan mengganti dengan saputangan atau menggunakan tisu dengan lebih bijak.
2. Mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas belanja sendiri.
3. Membeli baju dengan model bahan yang lebih *longlasting* (Sepanjang masa) sehingga bisa membantu mengurangi polusi.

*Recycle* (Mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat). Contoh sampah *Recycle* adalah:

1. Mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali.
2. Mengolah sampah organik (sudah tidak dipakai lagi oleh pemilik sebelumnya tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar) bisa menjadi pupuk kompos.
3. Menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan.

Daur ulang dengan jumlah yang besar belum menjadi suatu aktivitas yang biasa di lakukan di Indonesia, salah satunya adalah tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan sampah non-organik masih banyak yang belum di terapkan di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru

berkorelasi terhadap peningkatan aktivitas penduduk yang juga mempengaruhi daya konsumsi dari masyarakat, semakin tinggi daya konsumsi masyarakat tentunya berakibat pada semakin bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang diproduksi setiap harinya, sayangnya persoalan sampah tidak didukung oleh sistem pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat sehingga persoalan sampah menjadi permasalahan yang rutin dihadapi tanpa ada penyelesaian yang optimal.

**Tabel I.2 Lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Pekanbaru Tahun 2020.**

No.	Lokasi	Nama (TPS)	Jumlah TPS
-----	--------	------------	------------



1.	Bukit Raya	<p>Terdapat sebanyak 17 TPS yang ada di Wilayah Kecamatan ini yaitu di antaranya adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPS Disdukcapil di Jalan Mustafa Sari.</li> <li>2. TPS di Jalan Parit Indah.</li> <li>3. TPS Metro Swalayan di Jalan Harapan Raya.</li> <li>4. TPS Kantor BPK di Jalan Jenderal Sudirman dan</li> <li>5. TPS Dinas Petambangan di Jalan Sudirman.</li> <li>6. TPS Perkantoran Grand Sudirman di Jalan Parit Indah.</li> <li>7. TPS Perum Maharaja di Jalan Parit Indah.</li> <li>8. TPS Perum Alam Permai V di Jalan Parit Indah.</li> <li>9. TPS Perum Villa Maharatu di Jalan Parit Indah.</li> <li>10. TPS Rudenim di bekang Purna MTQ.</li> <li>11. TPS Perkebunan di belakang Purna MTQ.</li> <li>12. TPS Gedung Guru di Jalan Parit Indah.</li> <li>13. TPS LP Dewasa di Jalan Kafling.</li> <li>14. TPS LP Wanita di Jalan Kafling.</li> <li>15. TPS Hotel The Palace di Jalan Kaharuddin Nasution.</li> <li>16. TPS Koran Tribun di Jalan Harapan Raya dan</li> <li>17. TPS SMA 14 di Jalan Karya Air Dingin.</li> </ol>	17 TPS.
<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Nama (TPS)</b>	<b>Jumlah TPS</b>
2.	Tenayan Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPS BKN di Jalan Hangtuah.</li> <li>2. TPS SMA 10 di Jalan Bukit Barisan.</li> <li>3. TPS Jordan di Jalan Lintas Timur</li> <li>4. TPS Kantor Camat di Jalan Budiluhur.</li> <li>5. TPS Rusunawa di Jalan Sail.</li> <li>6. TPS Perum Kulim Raya Permai di Jalan Danau Toba.</li> </ol>	6 TPS.
3.	Sukajadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPS di belakang Plaza Matahari.</li> <li>2. TPS Rajawali di Jalan Rajawali dan</li> </ol>	3 TPS.

		3. TPS RS Eria Bunda di Jalan KH Ahmad Dahlan.	
4.	Sail	1. TPS Fakultas Kedokteran di Jalan Diponegoro. 2. TPS Dipo di Jalan Diponegoro samping PMI. 3. TPS di Jalan Diponegoro dan 4. TPS Puskesmas di Jalan Hangjebat.	4 TPS.
5.	Senapelan	1. TPS Senapelan di Jalan Wakaf belakang Mapolsek Senapelan. 2. TPS Pasar Bawah di Jalan Ahmad Yani ujung. 3. TPS Beacukai di Jalan Sudirman.	3 TPS.
6.	Pekanbaru Kota	1. TPS Al-Falah di Jalan Sumatera. 2. TPS Polda di Jalan Gajah Mada. 3. TPS Beacukai di Jalan Hasan Basri. 4. TPS Zainal Abidin di Jalan T Zainal Abidin.	4 TPS.
7.	Lima Puluh	1. TPS Hasanudin di Jalan Hasanudin. 2. TPS Rintis di Jalan Rintis. 3. TPS Pasar 50 di Jalan SSK. 4. TPS Kimia Farma di Jalan Sisingamangaraja. 5. TPS di dekat rumah mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah di Jalan Sisingamangaraja. 6. TPS Sei Duku di Jalan Tanjung Datuk. 7. TPS Pujasera di Jalan SSK. 8. TPS Plaza Senapelan di Jalan Teuku Umar.	8 TPS.
9.	Payung Sekaki	2. Di Kecamatan ini hanya terdapat satu TPS resmi yakni TPS Pasar Burung di Jalan Durian.	1 TPS.
<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Nama (TPS)</b>	<b>Jumlah TPS</b>
10.	Marpoyan Damai	1. TPS Pasar Pagi Arengka di Jalan Soekarno-Hatta. 2. TPS Ampera Rika di Jalan Soekarno-Hatta dan 3. TPS PT Saempoerna di Jalan Arifin Ahmad.	3 TPS.
11.	Tampan	1. TPS RS Awal Bros di Jalan HR Soebrantas. 2. TPS RS Aulia di Jalan HR Soebrantas. 3. TPS RS Tipe C atau RSD Madani di Jalan	4 TPS.

		Garuda Sakti, dan 4. TPS Toko Dunlop di Jalan Seokarno-Hatta.	
12.	Rumbai Dan Rumbai Pesisir	1. TPS Gabus di Jalan Gabus. 2. TPS Pasar Rumbai di Jalan Sekolah. 3. TPS Lembah Damai di Jalan Lembah Damai. 4. TPS Rusunawa di Jalan Yossudarso, TP Trans Dipo RW 9 di Jalan Teluk Leok. 5. TPS Trans Dipo RW 12 di Jalan Teluk Leok. 6. TPS Trans Dipo RW 15 di Jalan Padat Karya. 7. TPS Pesisir di Jalan Pesisir.	7 TPS.

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2020

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru mencatat, terdapat 61 titik tempat penampungan sementara (TPS) sampah resmi atau ilegal yang tersebar di 12 Kecamatan. Puluhan TPS sampah ini tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga ada milik swasta, dan juga terdapat 1 TPA di Kota Pekanbaru yaitu di lokasi Muara Fajar Rumbai, dari data DLHK diatas adalah nama Kecamatan/Kota dan lokasi TPS yang ada di Kota Pekanbaru. Selain di lokasi yang sudah ditetapkan, warga juga bisa membuang sampah di puluhan tong sampah portable yang telah disebar disejumlah titik jalan. Tentunya harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru peneliti memfokuskan di Kecamatan Bukit Raya sebagai lokasi penelitian yang terdapat paling banyak TPS dan penumpukan sampah, Sehingga penulis memilih Kecamatan Bukit Raya sebagai penelitian.



Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pembayarn denda minimal Rp250 ribu. Apabila denda tidak dibayar, maka dilakukan penahanan sementara terhadap KTP warga yang bersangkutan.

Dari pemaparan pemahaman diatas dapat diketahui permasalahan masalah yaitu:

1. Kurangnya penerapan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), konsep 3R (reduce, reuse, recycle) yang ada di kawasan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Karena masih ada beberapa yang tidak memiliki TPS disekitar kawasannya, dan juga kurangnya penerapan kinerja dalam penempatan tempat pembuangan sampah sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
2. Kurangnya sosialisasi masyarakat dalam pengolahan sampah konsep 3R, sehingga banyak masyarakat yang tidak tau bahwa pentingnya pengelolaan sampah dalam konsep 3R di kehidupan sehari-sehari bagi masyarakat disekitar.
3. Kurang optimalnya perhatian yang di lakukan oleh pihak pemerintah terhadap kebijakan pengelolaan sampah konsep 3R, melalui perangkat kerja dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sehingga masih banyak yang tidak mematuhi peraturan dalam pembuangan sampah..

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi peneliti menganggap bahwa fenomena tersebut adalah masalah dalam kebijakan Pemerintah Daerah kurang baik dalam menjalankan kinerja dan fungsinya khususnya mengenai pengelolaan

sampah konsep 3R. Berdasarkan fenomena sebagaimana ditemukan dan telah dijelaskan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas mengenai masih kurangnya kepedulian dalam Mengevaluasi Kinerja Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengolahan Sampah Konsep 3R (Studi Kasus Pada Pngelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan). Untuk mempermudah Pelaksanaan penelitian serta menginterpretasikan hasil dari penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan masalah yang akan dijadikan arahan dan pedoman penelitian dengan melihat masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R Kota Pekanbaru di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) tidak berjalan semestinya?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam Mengevaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui konsep 3R di Kota Pekanbaru Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)?

### **1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Didasari oleh penyajian permasalahan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah melalui Konsep 3R Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah melalui Konsep 3R Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

Didasari oleh penyajian permasalahan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat menentukan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini di harapkan dapat mengacu pada perkembangan ilmu pemerintahan minimal dapat memperkaya pengetahuan dari hasil-hasil penelitian.
2. Manfaat bagi kepentingan akademis, bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Konsep 3R Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan informasi data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian pada kasus yang sama.
3. Manfaat praktis, sebagai pengetahuan baik bagi diri sendiri, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintahan yang bergerak pada bidang sosial tentang



pentingnya Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan  
Dalam Pengolahan Sampah Konsep 3R Di Kecamatan Bukit Raya Kota.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **2.1 Studi Pustaka**

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian, penulis mengembangkan beberapa konsep teori yang diperlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai titik tolak ukur pada permasalahan.

Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan penulis akan menjelaskan/memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

### **1. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua belah pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Musanef dalam Syafiie (2014;11) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas,

berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut H. A Brasz dalam Syafiie (2014;9) , peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan peranannya. Perbedaan antar kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pemerintahan.

Menurut Musanef dalam Syafiie (2013;32), Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- b. Pemerintahan adalah segala daya upaya Negara untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut bergantung pada tipe yang melekat pada Negara tersebut. Andaikan suatu Negara bertipe Negara kemakmuran, maka Negara itu berarti segala upaya untuk menciptakan kemakmuran bagi warganya.
- c. Pemerintahan yang berdaulat mempunyai hak di dalam pengurusan rumah tangga tersebut termasuk melindungi masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.
- d. Pemerintahan yang terdiri dari sejumlah orang yang sebagian berasal dari rakyat yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang tidak mementingkan pribadinya melainkan mengabdikan kepada masyarakat dan mengurus kepentingan umum.



Menurut, C.F.Strong (1960;10) : Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Berlainan dengan pendapat Resental pemerintahan umum, maka Brasz mendefinisikan pemerintahan umum sebagai berikut: Pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagai mana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modren sekarang ini, meminkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi dari pada Negara didalam semua perwujudan (mulai dari Negara sendiri, provinsi kabupaten kota Pekanbaru.

Menurut Syafiie (2011;8) Ilmu pemerintahan ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010;16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah yang kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Labobo (2011;2) ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Gaffar (dalam Ndraha 2010;16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintah sebuah Negara.

Menurut Budiarjo (2009;16) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2011;19) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Syafiie (2011;20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU No. 32 Tahun 2004.

Menurut Surbakti (1999;168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011;78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birkrasi.



- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

Menurut Nidraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai Ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya sehingga dapat diterima

oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan, jadi normatif, ideal,, *das sollen*, dan kedua dari sudut senyatanya pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak jadi empirik, *das sein*.

Menurut Syafiie (2011;11) Ilmu Pemerintah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Labolo (2011;2) Ilmu Pemerintahan mengkrontuksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Gaffar (dalam Ndraha. 2010;16) mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas.

Brasz (dalam Syafiie. 2007;20) Ilmu Pemrintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya, sedangkan Ismani (1996;8) pemerintah dapat diartikan sebagai suatu proses

tempat pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

## 2. Konsep Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi Pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat mengkehendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.



Selain itu Menurut Ndraha (dalam Labobo, 2006;25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tututan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana

Selanjutnya Rsyid (dalam Labobo, 2006;26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

### 3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

### 4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu sering dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang menurut dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

### 3. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada asas otonomi dan asas tugas pembantuan, asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekosentrasi adalah penyerangan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerinth dalam system NKRI. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau *instansi vertical* diwilayah tertentu Pasal 1 ayat 8.

Adapun hal-hal yang dapat di laksanakan dengan tugas pembantuan adalah:

1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat;
2. Urusan secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat;
3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah;
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.

#### **4. Konsep Kebijakan**

Ndraha mengatakan dalam bukunya *Kybernology* (ilmu pemerintahan baru) (2011:491) bahwa ada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa “*policy*” adalah “*a course of action*”. Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut Aranson (dalam Ndraha, 2011:491) “*policy is a pattern of collective action*”.

Menurut Holwet dan Ramesh dalam (subarsono, 2005;13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.



- b. Formulasi Kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan Kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi Kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
- e. Evaluasi Kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Menurut Nugroho (2004;101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan yang dilihat dari kebijakan public yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan public untuk meningkatkan kehidupan public itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dye (dalam Nurcholis 2007;264) Kebijakan Publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan

Menurut Koryati (2005;2007) Kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Pendapat Ripley dan Franklin berikut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga, dan hasil kebijakann yang sesuai dengan rencana dari kebijakan.

- a. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:69) Tingkat Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Indikator pertama memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementator dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program.
- b. Menurut Aakib, Haedar (2010) lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.
- c. Menurut Akib, Haedar (2010) terwujudnya Kinerja dan dampak yang dikehendaki, bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

Jadi pendapat yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin ini peneliti gunakan sebagai indikator penilaian bagaimana Analisis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengolahan sampah Kecamatan Marpoyan Damai.

### **5. Konsep Kinerja**

Menurut Mahsun (2006:25) Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang telah ditetapkan.

Mahsun (2006:31) memaparkan bahwa organisasi publik memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Sehingga organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya mengukur tingkat efisiensi. Pengukuran kinerja pegawai sektor publik meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Kelompok Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu bagian yang dapat berupa fisik atau nonfisik.

#### **6. Evaluasi Kebijakan**

Wiliam N. Dunn (1999:608-610), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan.

Arikunto (2004:4) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data informasi tentang pekerjaan sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk membentuk alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna sebagai pihak decision maker/untuk



menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Kemudian Menurut Indiahoo (2009:145) evaluasi kebijakan publik adalah menilai suatu keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjukkan kepada dua aspek proses dan berhasil.

Menurut Ndraha (2011:201-202) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standard dan fakta analisis hasilnya. Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya adalah:

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan pelaku, *Treatment*. Tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
2. Model *das solen-das sein*. Yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das solen*.
3. Model kelompok *control-kelompok tes*, yaitu perbandingan antara kelompok *control* tanpa perlakuan dengan kelompok tes diberi perlakuan. Tolak ukurnya adalah kelompok *Control*.

Sydam (2000:12) berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan *alternative* yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan.

Kemudian Wiyono (2001:71) mengemukakan bahwa evaluasi adalah sesuatu kegiatan yang mengukur dan memberi nilai secara objektif dan valid, dimana sebagian besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan

dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah *efektif* dan *efisien*.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Subarsono (2009:119) bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya, evaluasi berguna untuk memberi input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Syukur dalam Maryadi (2005:79) bahwa terdapat tiga unsur penting dalam proses evaluasi yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilakukan.
2. Adanya target *group* yaitu kelompok masyarakat yang jadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan.

Kemudian Thomas Dye dalam Parson (2006:547) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang *objektif* dan *empiric* terhadap efek dari kebijakan dan program *public* terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingindicapai.

Selanjutnya Suchman dalam Winarno (2007:230) mengemukakan bahwa ada beberapa langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.

2. Analisis dan standarisasi kegiatan.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

**6. Konsep Lingkungan**

Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut No. 23 tahun 2007 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk didalamnya ada manusia dan ada segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Unsur Hayati (*Biotik*) yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia.
2. Unsur Sosial Budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.



3. Unsur Fisik (*Abiotik*) yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti: tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi.

Menurut Adi Asmara (2008) Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup lain. Ruang merupakan suatu tempat berbagai komponen lingkungan hidup menempati dan melakukan proses, sehingga antara ruang dan komponen lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lingkungan adalah *Factor eksternal* yang perkembangan manusia dan mencakup antara lain lingkungan sosial, status ekonomi dan kesehatan

Menurut Bagja Waluya (2010). Lingkungan hidup manusia dapat digolongkan dalam beberapa kelompok yaitu lingkungan fisik (*Physical environment*), lingkungan Biologis (*Biological environment*), dan lingkungan sosial (*Social Environment*).

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk mati seperti pegunungan, sungai, udara, air, sinar matahari, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri, seperti hewan, tumbuhan, jasad dan lain sebagainya, sedangkan lingkungan sosial mempunyai beberapa aspek seperti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap kerohanian dan lain sebagainya.

Menurut Bintaro dan Surastopo, (1991:22) Manusia tidak hanya tertarik kepada tanggapan dan penyesuaian terhadap lingkungan fisikalnya tetapi juga tertarik kepada interaksinya dengan manusia lain yaitu ruang sosialnya. Dinamika yang terdapat dalam lingkungan sosial dapat menimbulkan penyesuaian dan pembaharuan sikap dan tindakan terhadap lingkungan di mana itu hidup. Di pihak lain lingkungan fisikalnya di mana manusia itu hidup dapat mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang disebabkan oleh campur tangan manusi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep.

Menurut Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian yaitu teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.

**Tabel II.I Penelitian Terdahulu**

No.	Jurnal	Perbedaan	Persamaan
1.	Mohammad	Tujuan penelitian terdahulu adalah Untuk	Ruang lingkup

	Rendy/ Evaluasi Kebijakan Pengolahan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertanahan Kota Palu/ Vol. 3, No 11/ November/ Tahun 2015	mengetahui “Mengapa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palu belum mencapai tujuan sesuai yang di harapkan dalam Peraturan Daerah” sedangkan penulis bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimanakah Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah melalui Konsep 3R Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Di Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian terdahulu adalah Kota Palu sedangkan penulis di Kota Pekanbaru.	penelitiannya, yaitu tentang mengevaluasi kebijakan pengolahan sampah dengan baik. Penelitian ini sama-sama membahas tentang evaluasi kebijakan dalam pengolahan sampah.
<b>No.</b>	<b>Jurnal</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
2.	Muchammad Zamzami Elamin/ Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang/ Vol. 10, No. 4,/ Oktober/ Tahun 2018	Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk melibatkan pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana antara lain menempatkan sampah pada wadah yang sudah tersedi, proses pengumpulan sampah, pemindahan, dan pengangkutan sampah, serta pengolahan sampah hingga pada proses akhir. Sedangkan penulis bertujuan Untuk mengetahui Bagaimanakah Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah melalui Konsep 3R Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Di Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian terdahulu adalah Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Sedangkan penulis di Kota Pekanbaru.	Penelitian terdahulu dan penulis memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah sampah dalam pengolahan sampah. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif
3.	Mohammad Rizal/ Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Boya	Tujuan penelitian terdahulu adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengolahan persampahan di Kota Donggala. Sedangkan penulis adalah bertujuan Untuk mengetahui Bagaimanakah Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah melalui Konsep 3R Dinas Lingkungan Hidup Dan	Penelitian terdahulu dan penulis memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah sampah dalam pelaksanaan pengelolaan



Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)/ Vol. 9, No. 2./ Mei/ Tahun 2011	Kebersihan (DLHK) Di Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian terdahulu adalah pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Sedangkan penulis di Kota Pekanbaru.	persampahan.
---	---	--------------

**Sumber: Modifikasi Penulis, 2021**

### 2.3 Kerangka Pikiran

Kerangka Pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep-konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan dengan gambar berikut:

**Gambar II.2 Kerangka Pemikiran mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Konsep 3R Di Kecamatan Bukit Raya Kota.**



**Sumber: Modifikasi Penulis, 2021**

#### **2.4 Konsep Operasional**

Untuk mempermudah dalam menganalisa penelitian, menghindari kesalah pemahaman terhadap penelitian, dan menciptakan suatu kesatuan pengertian dan keseragaman bahasa maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel-variabel yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Konsep operasional merupakan batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada konsep berikutnya, dimaksudkan agar memberi arah dalam penulisan selanjutnya yaitu mendefinisikan sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang di tuntutan dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan.

4. Evaluasi adalah proses menentukan nilai atau pengukuran untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu dalam perbaikan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membandingkan hasil kegiatan dan menganalisisnya.
5. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
6. Indikator dari Evaluasi adalah:
  - a. Efektifitas (*effectiveness*), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
  - b. Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
  - c. Kecukupan (*Adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.



- d. Perataan (*Equity*), erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang diakibatkannya kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.
- e. Responsivitas (*responsiveness*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
- f. Ketepatan (*Appropriateness*), kriterian ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dan tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

## 2.5 Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan enam indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11.3 : Operasional Variabel Evaluasi Kebijakan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Konsep 3R Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi adalah penaksiran ( <i>Appraisal</i> ), pemberian angka ( <i>Rating</i> ), dan penilaian ( <i>Assesment</i> ), hasil yang menyangkut usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil	Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sampah konsep 3R. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).	1. Efektifitas ( <i>effectiveness</i> ).	a. Cara pengumpulan sampah 3R di setiap kecamatan/Kota. b. Apa cukup ketersediaan kapasitas TPS dibandingkan dengan kebutuhan ideal.
		2. Efisiensi ( <i>efficiency</i> ).	a. Adanya anggaran sampah khusus bagi Kecamatan/Kota dalam pengelolaan persampahan/kebersihan b. Kejelasan tentang cukupan area persampahan untuk setiap Kecamatan/Kota.

kebijakan. Dalam hal ini dapat di katakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan di buat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 : 608).			c. Pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R.
		3. Kecukupan ( <i>Adequacy</i> ).	<p>a. Pelaksanaan persampahan kebersihan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012.</p> <p>b. Pemanfaatan anggaran dimaksimalkan untuk pencapaian tujuan pendelegasian Kebijakan Pemerintah.</p> <p>c. Berkurangnya volume sampah dibandingkan dengan waktu sebelumnya.</p>
<b>Konsep</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
1	2	3	4
		4. Perataan ( <i>Equity</i> ).	<p>a. Kebijakan konsep 3R sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pemungutan sampah dilakukan secara merata disetiap Kecamatan/Kota.</p> <p>c. Kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan Kota.</p>
		5. Rensponsivitas ( <i>responsiveness</i> ).	<p>a. Keterlibatan masyarakat (partisipasi) dalam menjaga kebersihan lingkungan.</p> <p>b. Dukungan masyarakat dalam melaksanakan Kebijakan Pemerintah dalam Kosep 3R dalam permasalahan sampah ke Kecamatan/Kota.</p>



		6. Ketepatan ( <i>Appropriateness</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan TPS di beberapa titik untuk setiap Kecamatan/Kota.</li> <li>b. Terdapatnya petugas khusus di Kecamatan/Kota untuk penanganan persampahan/kebersihan</li> <li>c. Peningkatan persampahan/kebersihan setelah adanya Kebijakan Pemerintah Konsep 3R.</li> </ul>
--	--	--	---

Sumber: Olahan Penulis, 2021

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan pokok yang telah dirumuskan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dan mendefinisikan masalah serta mengumpulkan data dan menggunakan data dari lapangan melalui observasi dan wawancara untuk kemudian di analisis.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Menurut Silalahi (2010:27) penelitian Deskriptif ialah menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau

hubungan. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012;3) adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.

Artinya bahwa metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan informan, objek dan subjek penelitian. Alasannya metode penelitian kualitatif data yang dianalisis dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak harus selalu berbentuk angka atau koefisien antar variabel. Dan terkadang pada penelitian kualitatif, memungkinkan adanya data kuantitatif, akan tetapi, pada penelitian kualitatif, pengumpulan dan pengelolaan data umumnya bersifat pengamatan awal hingga akhir. Maka, penyajian analisis data pun akan sedikit berbeda dengan penelitian jenis kuantitatif. Karena itulah penelitian kualitatif lebih condong berada dibawah paradigma fungsionalisme, objektivisme, dan fakta sosial.

### **3.2 Lokasi penelitian**

Menurut Usman (2009;4) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini penulis lakukan pada:

1. Lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru khususnya lokasi di daerah Kota Pekanbaru dimana terdapat masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari.
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Alasan penulis memilih penelitian ini karena berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait kurangnya ketidak pedulian masyarakat terhadap sampah dalam konsep 3R dan juga kajian tentang pengolahan sampah lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

### **3.3 Key Informan dan Informan**

#### **1. Key Informan**

Menurut Syarat Key Informan adalah orang yang terlibat langsung dan menguasai dalam kegiatan uji layak tayang sebuah program acara yang akan ditayangkan.

Menurut Moleong (2005 : 3) key Informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan.



Dalam menentukan key informan, penulis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh seorang key informan yaitu orang yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga mampu menguasai kegiatan quality control. Maka dari itu key informan bisa ditentukan setelah melakukan penelitian terhadap informan. Melalui *sampling purposive* atau pengambilan sampel secara sengaja yang ditentukan sendiri oleh peneliti, key informan yang dipilih harus mengerti dan memahami setiap tahapan proses sampai dengan evaluasi. Adapun yang menjadi Key Informen dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

## 2. Informan

Informan menurut Moleong (2006 : 132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan *sampling purposif*.

Menurut Krisyanto (2007 : 154) *sampling purposif* yaitu teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria, sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Persoalan utama dalam menentukan kriteria, dimana kriteria harus mendukung tujuan penelitian. Biasanya *teknik purposif* dipilih untuk penelitian yang lebih mengutamakan kedalaman data, daripada untuk tujuan *representatif* yang dapat digeneralisasikan. Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis memilih informan yang memiliki kriteria tersendiri yaitu individu yang mengetahui dan memahami dalam pengolahan sampah dalam konsep 3R.

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ditemui secara langsung di wilayah penelitian di Kota Pekanbaru dengan cara mewawancarai dan memberikan kuesioner sesuai dengan fokus penelitian yaitu Evaluasi Kinerja Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengolahan Sampah Konsep 3R (Studi Kasus Pada Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan).

**Tabel III.1: Tabel Keadaan Informan dan Key Informan**

No.	Nama	Jabatan	Status
1.	Naimah, SE	Seksi Konservasi, Perubahan Iklim Dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)	Key Informan
2.	T. Ardi Dwisasti S.STP. M.SI	Kepala Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru	Informan
3.	Azhar, S.IP	Sekretaris Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru	Informan
4.	Dina Sepnita, S.STP., M.Si	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru.	Informan
No.	Nama	Jabatan	Status
5.	Endirios Mahidin, A.Md	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru	Informan
6.	Amira Safitri	Masyarakat	Informan
7.	M. Kausar Putra	Masyarakat	Informan

Sumber: Olahan Penulis, 2021

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposeve sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diajukan. Dalam bahasa sederhana *purposive sampling* dapat dikatakan sebagai secara sengaja

mengambil sampel tertentu sifat-sifat, karakteristik, ciri, criteria sampel dan jangan lupa mencerminkan populasinya.

Sugiyono menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Menurut pendapat Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui kinerja kebijakan pengolahan sampah konsep 3R Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK).



### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dieproleh. Ada dua (2) jenis sumber data dalam penulisan ini yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Data primer menurut Iskandar (2008:253) adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Merupakan data yang di kumpul secara langsung dari responden/informan atau yang di ambil langsung dari sumbernya tanpa perantara juga dapat dikatakan sebagai data yang di proleh dari kesaksian seseorang dengan mata kepala sendiri sebagai orang yang mengetahui tentang obyek.

#### 2. Sumber data sekunder

Menurut Iskandar (2008:253) adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan lainnya. Diperoleh melalui catatan-catatan, pustaka, arsip yang tidak berkenan langsung dengan responden atau informan. Selain data yang diperoleh langsung dari sumbernya, peneliti juga menggunakan pustakaan sebagai bahan acuan tentang teori maupun informan yang relevan dengan kinerja kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK).

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, observasi serta dokumentasi.

- a. Wawancara/Interview adalah peneliti menggunakan salah satu jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur. Dimana peneliti memberikan pertanyaan kepada informan/responden dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disediakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk memudahkan peneliti dalam proses wawancara maka disiapkan alat bantu berupa alat tulis, buku catatan dll.
- b. Observasi adalah Teknik menggunakan pengamatan dan penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisai, situasi, proses, atupun prilaku. Observasi adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan dalam tingkat penafsiran analisis.
- c. Dokumentasi adalah Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan keadaan di lokasi penelitian.

### 3.7 Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif karena lebih relevan dengan obyek penelitian. Data yang

diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif, kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan permasalahan atau fenomena yang ada serta menjelaskan secara menyeluruh hal yang berkaitan dengan mengevaluasi kinerja kebijakan pengolahan sampah dalam konsep 3R Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

### 3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Adapun jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari tahun 2021 bulan Januari. Adapun rincian kegiatan penelitian digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 111.2: Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Januari				Februari				Maret				Juli				September				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal																								
2.	Ujian Proposal																								
3.	Revisi Proposal																								
4.	Revisioner																								





Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2003, Kecamatan Bukit Raya berbatasan langsung dengan daerah kabupaten Kampar serta kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sail
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan Bukit Raya juga merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru yang terdiri atas 4 (empat) kelurahan, 58 Rukun Warga (RW), dan 245 Rukun Tetangga (RT). Luas Kecamatan Bukit Raya adalah 22.05 Km<sup>2</sup> dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Simpang Tiga dengan luas 13,65 Km<sup>2</sup>
- b. Kelurahan Tangkerang Selatan dengan luas 3,09 Km<sup>2</sup>
- c. Kelurahan Tangkerang Utara dengan luas 2,64 Km<sup>2</sup>
- d. Kelurahan Tangkerang Labuai dengan luas 2,67 Km<sup>2</sup>

## 2. Iklim

Kecamatan Bukit Raya mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,4<sup>0</sup>C - 33,8<sup>0</sup>C dengan suhu udara minimum berkisar antara 23,0<sup>0</sup>C - 24,2<sup>0</sup>C. Curah hujan antara 66,3-392,4 mm per tahun. Kelembaban berkisar antara 68% - 83%.

## 4.2 Pemerintahan

Kecamatan Bukit Raya juga merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru yang terdiri atas 4 (empat) kelurahan, 58 Rukun Warga (RW), dan 245 Rukun Tetangga (RT). Luas Kecamatan Bukit Raya adalah 22.05Km<sup>2</sup> dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Simpang Tiga dengan luas 13,65 Km<sup>2</sup>
2. Kelurahan Tangkerang Selatan dengan luas 3,09 Km<sup>2</sup>
3. Kelurahan Tangkerang Utara dengan luas 2,64 Km<sup>2</sup>
4. Kelurahan Tangkerang Labuai dengan luas 2,67 Km<sup>2</sup>

#### **4.3 Penduduk**

Jumlah penduduk Kecamatan Tenayan Raya mencapai 109.929 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2.64 persen dari tahun 2018. Kepadatan penduduknya mencapai 980 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2019 terdiri dari 54.696 jiwa Penduduk Laki-Laki dan 55.260 jiwa Penduduk Perempuan.

#### **4.4 Sosial**

##### **1. Pendidikan**

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Bukit Raya dalam publikasi ini disajikan mengenai data pendidikan meliputi data TK, SD, SLTP dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.

##### **2. Pertanian**



Seiring dengan meningkatnya kegiatan Pembangunan sektor Pertanian di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari perencanaan yang mantap. Salah satu upaya nyata guna mendukung proses perencanaan adalah tersedianya data lengkap, akurat dan terpercaya. Data yang disajikan dalam Penerbitan ‘Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka Tahun 2019’ merupakan data dasar yang meliputi beberapa sektor. Penyajian data dimaksud tentunya akan dimanfaatkan oleh aparat perencana dan pelaksana pembangunan sektor pertanian serta masyarakat lain yang membutuhkan terutama di Kecamatan Bukit Raya.

### **3. Industri**

Yang dimaksud industri sedang adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 20 s.d 99 orang, sedangkan industri besar yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Sementara itu industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 s.d. 19 orang.

### **4. Perhubungan dan Komunikasi**

Transportasi sangat penting bagi kelancaran dalam menunjang perekonomian suatu daerah khususnya Bukit Raya. Salah satu sarana penunjang pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari jumlah akomodasi yang dimiliki, diantaranya penginapan atau hotel.

#### **4.5 Sejarah Lokasi Penelitian**

Kecamatan Bukit Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 dan secara administrasi Bukit Raya dimulai pada tanggal 2 Juni 1988. Dan Bukit Raya merupakan

pemekaran dari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2003, Kecamatan Bukit Raya di mekarkan menjadi 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Bukit Raya sebagai kecamatan induk, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tenayan Raya sebagai kecamatan pemekaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2003, Kecamatan Bukit Raya berbatasan langsung dengan daerah kabupaten Kampar serta kecamatan sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sail
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

Adapun Visi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru “Terwujudnya Kecamatan Bukit Raya Yang Profesional Dalam Penyelenggaraan Pemerintah”  
Penjelasan Visi Profesional adalah bagaimana Kecamatan Bukit Raya dapat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsinya secara efisiensi, fleksibel dan mempunyai etos kerja yang tinggi.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, tentunya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Raya yaitu dapat mewujudkan penyelenggraan tugas umum pemerintahan serta penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota Pekanbaru secara Profesional.

Sedangkan Misi Kecamatan Bukit Raya adalah untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dan berdasarkan perumusan misi yang telah disusun oleh tim penyusun renstra Kecamatan Bukit Raya, dapat dituangkan melalui 3 (tiga) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Raya sebagai berikut:

1. Mewujudkan aparat Kecamatan yang Profesional
2. Meningkatkan Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Dalam mencapai misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap apatur Kecamatan Bukit Raya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### **4.6 Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Raya**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Pokok Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka susunan organisasi Kecamatan Bukit Raya sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
  - b. Kepala Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat



6. Kasi Kesejahteraan Sosial

7. Kasi Pelayanan Terpadu

#### **4.7 Gambara Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Adapun Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Terbersih, Hijau, dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang Madani”

Sedangkan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih
- b. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Hijau
- c. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah
- d. Kota Pekanbaru sebagai Kota Gemerlap
- e. Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani
- f. Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan

#### 4.8 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Perwako Pekanbaru Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka *system* yang dianut berbentuk *Line Down Staff*, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepala Sub Dinas dan apabila pimpinan tidak berada ditempat, maka yang melaksanakan kegiatan sehari-hari pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
  1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
  2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
  3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :

1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
  2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
  2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
  3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.





**BAB V**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Nama dan Identitas Informan**

Dalam penulisan karangan ilmiah perlu dikemukakan identitas yang menjadi informan penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil peneliti yang dibuat penulis maka nama-nama serta identitas jabatan seluruh informan akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel V.1 Nama dan identitas Informan**

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan

1	Naimah, SE	49 Tahun	Perempuan	S1	Seksi Konservasi, Perubahan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
2	T. Ardi Dwisasti S.STP. M.Si	35 Tahun	Laki-Laki	S2	Kepala Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru.
3	Azhar, S.IP	46 Tahun	Laki-Laki	S1	Sekretaris Camat Bukit Raaya Kota Pekanbaru
4	Dina Sepnita, S.STP., M.Si	49 Tahun	Perempuan	S2	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru.
5	Endirios Mahidin, A.Md	45 Tahun	Laki-Laki	S1	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru.
6	Amira Safitri	40	Perempuan	SMA	Masyarakat
7	M. Kausar Putra	30	Laki-Laki	SMA	Masyarakat

**Sumber: Olahan Penulis, 2021**

## **5.2 Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Dalam hal ini mengetahui Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam menyelenggaraan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki peran yang sangat penting dalam bidang kebersihan lingkungan. Untuk mengetahui permasalahan mengenai Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru penulis menetapkan indikator Evaluasi yang dirumuskan oleh Wiliam N. Dunn. Indikator tersebut yakni: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketetapan. Setelah masing-masing indikator dibahas dan di evaluasi diketahui faktor-faktor apasaja yang menjadi penghambat Evaluasi Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

### **1. Efektifitas**

Efektifitas (*effectiveness*), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada indikator Efektifitas berkaitan dengan memberikan pencapaian tujuan mengenai pengumpulan sampah dalam konsep 3R yang diberikan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya, maka peneliti menguraikan ketentuan sub indikator dibawah ini sebagai berikut:

#### **1.1 Pengumpulan sampah**

Pengumpulan atau pengolahan sampah adalah duck pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Mengenai bagaimana cara pengumpulan sampah dalam konsep 3R di setiap Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesuai dengan hasil wawancara



dengan Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ibuk Naimah, SE di ruangnya pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB, mengatakan:

*“Pelaksanaan pemungutan sampah dalam Konsep 3R kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sudah efektif dan sudah terlaksana dengan baik apalagi sekarang Camat sudah turun juga untuk memberikan arahan yang di dapat dari DLHK kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menangani sampah, dan ketersediaan kapasitas TPS pun sudah banyak di beberapa titik”.*

Dalam hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pengumpulan sampah dalam konsep 3R sudah terlaksana dengan baik dalam Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru kepada masyarakat yang mana ini sangat penting dalam kinerja konsep 3R. Sedangkan Hasil wawancara dengan Kepala Camat Bukit Raya Bapak T. Ardi Dwisasti S.STP. M.Si hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB mengatakan:

*“Penanganannya sampah masih dalam proses dan akan berlanjut untuk kedepannya dalam meningkatkan pengumpulan sampah dan sekarang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melibatkan RT/RW untuk menangani sampah di pemukiman masyarakat agar berjalan dengan baik sehingga dapat menuju tujuan yang telah dibuat”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kepala Camat Bukit Raya Bapak T. Ardi Dwisasti S.STP. M.Si hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB diruangan Kantor Kepala Camat Bukit Raya, dapat kita ketahui

terkait dengan indikator Efektifitas bahwa penanganan pengumpulan sampah telah berusaha untuk mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB bahwa pengumpulan sampah telah dilakukan dengan baik tetapi masih dalam penanganan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

## 1.2 Ketersediaan kapasitas

Kapasitas yakni daya tampung sesuatu atau batas isian dari benda tertentu, dan juga daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia. Mengenai bagaimana ketersediaan kapasitas TPS apakah cukup dengan dibandingkan kebutuhan ideal, merupakan salah satu faktor penting karena bagaimana baiknya kinerja atau kebijakan itu berjalan berdasarkan yang diberikan pada masyarakat.

Menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban Camat Bukit Raya Bapak Endirios Mahidin, A.Md diruangannya pada hari Selasa, 14 September 2021 Pukul 11:30 WIB mengatakan:

*“Tetapi walaupun sudah efektif dalam pemungutan sampah masih kurang dalam idealnya kebutuhan sehari-hari, karena tidak tercukupi oleh gaya hidup masyarakat maka dari itu volume sampah belum menurun dan sekarang masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah sehingga disitula kendalanya, dan selama ini cukup tetapi untuk tahun ketahun mungkin penuh maka kami kemungkinan akan mencari lahan baru untuk membuat TPS tersebut untu di Kecamatan”.*

Dalam hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa ketersediaan kapasitas TPS belum terlaksana dengan baik dalam Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru karena terbatasnya area untuk pembuangan sampah sehingga penuh dengan jangka waktu yang tidak lama.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan hari Selasa, 14 September 2021 Pukul 11:30 WIB bahwa ketersediaan kapasitas telah dilakukan dengan cukup baik dalam menangani area untuk pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada informan mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengolahan sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam indikator Efektifitas dalam pengumpulan sampah sudah baik yang mana dalam pengumpulan sampah sudah efektif di Kecamatan Bukit Raya sedangkan kendala dalam pengolahan sampah saat ini ketidak sesuaiannya kebutuhan ideal dengan kapasitas TPS yang tersedia sehingga jumlah volume sampah selalu meningkat setiap tahunnya dan juga kurangnya ketersediaan area untuk pembuangan sampah di TPS.

## **2. Efisiensi**

Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan



Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada indikator Efisiensi mengenai anggaran sampah khusus bagi kecamatan Bukit Raya dalam pengelolaan persampah dan kebersihan, maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator dibawah ini, sebagai berikut:

### **2.1 Adanya Anggaran**

Anggaran umumnya merujuk pada daftar rencana seluruh biaya dan pendapatan. Mengenai adanya anggaran sampah khusus bagi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesuai dengan hasil wawancara dengan seksi Pemberdayaan Masyarakat Camat Bukit Raya Ibuk Dina Sepnita, S.STP., M.Si diruangannya pada hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB mengatakan:

*“Ada karena kita ada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengangkutan persampahan ini maka adanya sampah khusus dalam pengelolaan sampah”.*

Dalam hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa adanya anggaran sampah khusus sudah terlaksana dengan teratur tetapi masih ada saja yang kurang bertanggung jawab atas pekerjaan dalam pengambilan sampah dilingkungan masyarakat. Sedangkan Hasil wawancara dengan Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ibuk Naimah, SE di ruangan nya pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB mengatakan:

*“Anggaran ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diambil dari sumbangan warga yang dimintai dari rumah kerumah*

*semenjak terlibatnya RT/RW yang ikut serta, dan juga belum maksimal karena masih ada yang tidak ikut serta dalam pembayaran untuk petugas pengambilan sampah dan sekarang masih dirapatkan bagaimana kedepannya agar berjalan dengan baik antara DLHK, Camat, Lurah dan RT/RW”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ibuk Naimah, SE di ruangan nya pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB dapat kita ketahui terkait dalam anggaran masih kurang maksimal karna banyaknyanya pengeluaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sehingga terbatasnya anggran dalam pengolahan sampah.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti dilapangan hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB bahwa anggaran persampahan telah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar tercukupi untuk penanganan pengolahan sampah.

## **2.2 Kecukupan Area**

Mengenai kejelasan tentang kecukupan area unttuk setiap daerah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Camat Bukit Raya Bapak T. Ardi Dwisasti S.STP. M.Si hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB mengatakan:

*“Selama ini cukup tetapi untuk tahun ketahun mungkin penuh maka kami kemungkinan akan mencari lahan baru untuk membuat TPS tersebut untu di Kecamatan”.*

Dalam hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kecukupan area itu sangat penting dalam pembuangan sampah dan belum terlaksana dengan baik karena kurang luasnya ketersediaan area untuk pembuangan sampah di TPS.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB bahwa kecukupan area kurang memadai karena areanya kurang luas sehingga TPS untuk pembuangan sampah cepat penuh dalam kurun waktu beberapa tahun saja, tetapi pihak DLHK akan terus mencari area baru untuk pembuangan sampah sehingga tidak gampang penuh.

### 2.3 Pengelolaan Sampah

Mengenai pengelolaan masalah sampah dengan prinsip 3R, sesuai dengan hasil wawancara oleh Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ibuk Naimah, SE di ruangan nya pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB, mengatakan:

*“Kalau dengan pengelolaan sampah dalam konsep 3R ini kita melakukan dengan bersosialisasi dengan masyarakat bagaimana kita bisa memilah sampah dari rumah seperti sampah organik atau anorganik harusnya begitu yang organik dijadikan pupuk, kompos dan yang anorganik kita buang ke tong sampah dan kita akan terus melakukan sosialisasi dan jika sosialisasinya berjalan insyaallah semuanya akan terkendali dengan baik”.*



Dalam hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pengolahan sampah dengan prinsip 3R sudah terlaksana dengan baik terhadap keikutsertaan masyarakat dalam membantu menangani sampah disekitar.

Berdasarkan hasil Observasi 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB diruangannya, bahwa Berkenaan dengan DLHK telah berusaha melakukan kinerja dalam pengolahan sampah dan menimbang yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektif dalam pengolah sampah, tentu di lakukan dengan cukup baik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menjalankan pengolahan sampah di kecamatan Bukit Raya. Di lakukan dengan cukup baik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menjalankan pengolahan sampah di kecamatan Bukit Raya dan akan terus berusaha dalam mengurangi volume sampah, dan terkait dengan indikator efisiensi terhadap Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah tersebut dapat berjalan dengan baik terutama dalam hal pengelolaan khusus dalam persampahan atau kebersihan.

### **3. Kecukupan**

Kecukupan (*Adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada indikator Kecukupan

mengenai pelaksanaan persampahan kebersihan sesuai dengan perwako, maka peneliti menguraikan ketentuan sub indikator dibawah ini sebagai berikut:

### 3.1 Pelaksanaan Perwako

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Mengenai pelaksanaan persampahan kebersihan sesuai dengan perwako, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Camat Bukit Raya Bapak Endirios Mahidin, A,Md diruangannya pada hari Selasa, 14 September 2021 Pukul 11:30 WIB mengatakan:

*“Seharusnya sesuai karna kita suda ada UUD Persampahan ada perwako juga dan harus sesuai dengan peraturan tersebut juga”.*

Dalam hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan Perwako telah sesuai walaupun tidak keseluruhan, dan sudah melakukan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan kebersihan dengan Perwako.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti dilapangan hari Selasa, 14 September 2021 Pukul 11:30 WIB bahwa pelaksanaan Perwako dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan tujuan yang ingin di capai.

### 3.2 Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan yakni suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadi suatu yang ada menjadi bermanfaat. Mengenai pemanfaatan anggaran dimaksimalkan untuk pencapaian tujuan pendelegasian Kebijakan Pemerintah, menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ibuk

Naimah, SE di ruangnya pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB, mengatakan bahwa:

*“Pemanfaatan anggaran dimaksimalkan untuk mencapai tujuan pendelegasian Kebijakan Pemerintah, sesuai Terkadang sampah ini bergerak terus namanya kita hidup pasti menghasilkan sampah juga terkadang anggaran itu tidak mencukupi untuk pengelolaan sampah”.*

Dalam hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pemanfaatan anggaran sangat penting untuk pencapaian tujuan dalam Kebijakan Pemerintah dalam pengolahan sampah.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB bahwa pemanfaatan anggaran telah dilakukan dengan baik, dan pemanfaatan anggaran sangat penting untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

### **3.3 Volume Sampah**

Mengenai berkurangnya volume sampah dengan menggunakan konsep 3R dibanding dengan sebelumnya, menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Camat Bukit Raya Bapak Azhar, S.IP hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB mengatakan:

*“Belum berkurang, minimal kita targetkan sekitar 5% saja sudah bagus dalam pengurangan volume sampah ini karena harus sabar dalam pengurangan sampah ini untuk menjalankan proses pengolahannya agar sedikit demi sedikit berkurang sampai seterusnya”.*



Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah volume sampah akan terus meningkat jadi belum terlaksana dengan baik, jika tidak ada kesadaran dari masyarakatnya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan disekitar jika mengharapkan dari Pemerintah saja itu tidak bisa. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada indikator Kecukupan dalam pengelolaan pengumpulan sampah sudah baik yang mana dalam pengumpulan sampah sudah efisien di Kecamatan Bukit Raya sedangkan kendala dalam pengolahan sampah saat ini ketidak sesuaiannya anggaran dan jumlah volume sampah yang selalu meningkat sedikit demi sedikit sehingga jumlah volume sampah selalu meningkat setiap tahunnya dan masih kurang sadar masyarakat terhadap persampahan.

Berdasarkan hasil Observasi hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB diruangnya, bahwa Kecukupan suatu tingkat kurang memuaskan kebutuhan, di lakukan dengan kurang baik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menjalankan pengolahan sampah di kecamatan Bukit Raya, tanpa adanya dukungan anggaran tidak dapat berjalan lancar. Mengenai pelaksanaan pengolahan sampah dalam kebersihan sesuai dengan perwako.dalam proses pengumpulan sampah yang mana dalam pengumpulan sampah sudah efisien di Kecamatan Bukit Raya dan anggaran ditingkatkan lagi agar memaksimalkan kinerja dalam pengolahan sampah.

#### **4. Perataann**

Perataan (Equity), erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang diakibatkannya kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada indikator Perataan mengenai kinerja persampahan konsep 3R dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka peneliti menguraikan ketentuan sub indikator dibawah ini sebagai berikut:

#### **4.1 Kebijakan**

Kebijakan yakni rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Mengenai kinerja persampahan konsep 3R sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Camat Bukit Raya Bapak Endirios Mahidin, A,Md diruangannya pada hari Selasa, 14 September 2021 Pukul 11:30 WIB mengatakan:

*“belum sesuai Kinerjanya karna masih proses untuk menyesuaikan dengan UUD mungkin dimasa yang akan datang mungkin sudah sesuai dan terlaksana dengan baik”.*

Dalam hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Kebijakan Pemerintah masih dalam proses penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti dilapangan hari Selasa, 14 September 2021 Pukul 11:30 WIB bahwa kebijakan konsep 3R dalam penyesuaian terhadap peraturan yang ada untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

#### **4.2 Pemungutan Sampah**

Mengenai kejelasan tentang pemungutan sampah dilakukan secara merata disetiap Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ibuk Naimah, SE di ruangnya pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB, mengatakan bahwa:

*“Di Kota Pekanbaru ini ada 3 wilayah yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3 jadi selama ini berjalan dengan lancar dalam pemungutan sampah, karena sudah dibagi dengan beberapa titik wiayah”.*

Menurut hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pemungutan sampah dilakukan secara merata, dan sudah terlaksana dengan baik dalam Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB bahwa pemungutan sampah telah dilakukan secara



efektif dan berjalan dengan semestinya dan akan merata di setiap daerah dalam menangani sampah.

#### 4.3 Kerjasama Masyarakat

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Mengenai kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan sangat penting, menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Camat Bukit Raya Ibuk Dina Sepnita, S.STP., M.Si hari Rabu, 16 September 2021 Pukul 09:30 WIB mengatakan:

*“kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan ada yang peduli dan ada yang tidak kita terus bersosialisasi dan harus merasakan bahwa sampah itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri bahwa sampah itu juga ada nilai ekonominya jadi itu kita terus apakan agar masyarakat tidak membuang sampah dan agar mereka tau sampah bisa dipilah dan dijual dan menghasilkan uang dan juga menghasilkan kompos dan harus diingatkan terus”.*

Dari hasil wawancara yang diatas dapat kita ketahui bahwa kerjasama masyarakat sangat penting bagi Pemerintah dalam menjaga kebersihan, dan sudah mulai terlaksana dalam menangani sampah dan masyarakat sudah tergerak untuk berpartisipasi dalam menangani sampah.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan hari Rabu, 16 September 2021 Pukul 09:30 WIB bahwa kerjasama masyarakat sangat penting dan berpengaruh besar dalam mengurangi volume sampah tapi sekarang

Pemerintah masih berusaha agar tujuan untuk mengurangi volume sampah tercapai.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada indikator Perataann dalam pengelolaan pengumpulan sampah sudah baik yang mana dalam pengumpulan sampah sudah efisien di Kecamatan Bukit Raya sedangkan kendala dalam pengolahan sampah saat ini ketidak sesuaiannya adalah dalam kinerja persampahannya dan juga kurang kerjasama masyarakat sehingga jumlah volume sampah selalu meningkat setiap tahunnya dan masih kurang sadarnya masyarakat terhadap persampahan.

## 5. Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada indikator Responsivitas mengenai keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator dibawah ini sebagai berikut:

### 5.1 Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Mengenai ketertiban masyarakat/partisipasi dalam menjaga kebersihan dan lingkungan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ibuk Naimah, SE di ruangnya pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB, mengatakan:

*“Dengan bergotong royong dan juga RT/RW pun juga turun tangan untuk menangani persampahan di pemukiman warga agar masyarakat juga tergerak dan melakukan pembersihan disekitaran area rumah”.*

Dari hasil wawancara yang diatas dapat kita ketahui bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting bagi Pemerintah dalam menjaga kebersihan, dan sudah mulai terlaksana dalam menangani sampah dan masyarakat sudah tergerak untuk berpartisipasi dalam menangani sampah. Selan itu hasil wawancara dengan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Camat Bukit Raya Bapak Endirios Mahidin, A,Md diruangannya pada hari Selasa, 14 September 2021 Pukul 11:30 WIB mengatakan:



*“Keterlibatan masyarakat terkadang respon terkadang tidak dan juga kurang kesadaran diri dari masing-masing individu sehingga masih ada yang membuang sampah sembarangan tanpa ada rasa peduli terhadap lingkungan”.*

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dan berpengaruh besar dalam mengurangi volume sampah tapi sekarang Pemerintah masih berusaha agar tujuan untuk mengurangi volume sampah tercapai.

## **5.2 Dukungan Masyarakat**

Dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang baik itu secara moril maupun secara material untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan. Mengenai dukungan masyarakat dalam melaksanakan Kebijakan Pemerintah konsep 3R dalam permasalahan sampah, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Camat Bukit Raya Bapak Endirios Mahidin, A,Md diruangannya pada hari Selasa, 14 September 2021 Pukul 11:30 WIB mengatakan:

*“Ya seperti tadi melaksanakan peraturan sesuai UUD, dan terus juga menjaga kebersihan, dan juga tidak membuang sampah sembarangan dan juga dalam pembuangan sampah juga sudah ditetapkan waktu untuk membuang sampah”.*

Dalam hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam konsep 3R

sudah terkendali dan masyarakat sudah mulai mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti dilapangan hari Selasa, 14 September 2021 Pukul 11:30 WIB bahwa dukungan masyarakat sangat penting dalam menangani pengurangan sampah masyarakat termasuk sangat besar pengaruhnya terhadap sampah dan sekarang Pemerintah masih berusaha agar tujuan untuk mengurangi volume sampah tercapai.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada indikator Responsivitas dalam pengelolaan pengumpulan sampah sudah mulai baik yang mana dalam pengumpulan sampah sudah efektifitas di Kecamatan Bukit Raya sedangkan kendala dalam pengolahan sampah saat ini ketidak sesuaiannya adalah dalam kinerja persampahannya dan juga kurang kerjasama masyarakat sehingga jumlah volume sampah selalu meningkat setiap tahunnya dan masih kurang sadar masyarakat terhadap persampahan.

## **6. Ketepatan**

Ketepatan (*Appropriateness*), kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dan tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-

tujuan tersebut. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada indikator Ketepatan mengenai ketersediaan TPS konsep 3R di beberapa titik untuk setiap Kecamatan Bukit Raya sudah memadai, maka peneliti menguraikan ketentuan sub indikator dibawah ini sebagai berikut:

### **6.1 Ketersediaan TPS**

Ketersediaan adalah kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan. Mengenai ketersediaan TPS konsep 3R di beberapa titik untuk setiap Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sudah lengkap atau memadai. Dengan Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ibuk Naimah, SE di ruangannya pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 10.00 WIB, mengatakan:

*“Kita baru punya 5 (lima) itupun juga ibah Cuma belum beroperasi semua masih ditata juga”.*

Dan peneliti juga melakukan wawancara mengenai terdapatnya petugas khusus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk penanganan persampahan atau kebersihan. Dengan Kepala Camat Bukit Raya Bapak T. Ardi Dwisasti S.STP. M.Si hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB diruangannya terkait dengan indikator Ketepatan terhadap Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah tersebut dapat berjalan dengan baik terutama dalam hal petugas khusus untuk pemungutan sampah. Menurut hasil wawancara dengan mengatakan bahwa:



*“Ada dan akan tetap berjalan intinya masyarakat itulah yang seharusnya, kalau kita Cuma mengharapkan dari pemerintah tidak akan jalan dan jika udah ikut semua dan berpartisipasi pasti akan berjalan dengan baik”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pentingnya ketersediaan TPS yang banyak di beberapa titik dan juga penjagaan tempat kebersihan dan kedua berjalan dengan baik dan juga pentingnya kesadaran masyarakat akan lingkungan kebersihan.

## **6.2 Peningkatan Kebersihan**

Peningkatan adalah menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negative berubah menjadi positif. Mengenai adanya peningkatan dalam persampahan/kebersihan setelah adanya Kebijakan Pemerintah dalam konsep 3R. Dengan Sekretaris Camat Bukit Raya Bapak Azhar, S.IP diruangannya pada hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB mengatakan:

*“Jika penduduknya bertambah maka sudah pasti volume sampahnya meningkat jadi itu makanya pengurangan sampah melalui dengan konsep sampah 3R tersebut dan mengurangi sampah di TPA kebijakannya kesana dalam pengurangan sampah”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui terkait dengan indikator ketepatan terkait bahwa masyarakat khususnya Kecamatan Bukit Raya ini diketahui adanya peningkatan dalam kebersihan konsep 3R.

Berdasarkan hasil Observasi pada hari Selasa, 15 September 2021 Pukul 10:30 WIB diruangannya, bahwa dengan ketersediaan TPS di beberapa titik

memudahkan dalam proses pengolahan sampah dan berjalan dengan baik, dan juga terdapat petugas khusus dalam pengambilan sampah sehingga memudahkan masyarakat dalam membuang sampah, dan agar volume sampah juga bisa berkurang dengan seiring berjalannya waktu, dan sudah cukup baik ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menjalankan pengolahan sampah di kecamatan Bukit Raya dan akan terus berusaha dalam mengurangi volume sampah.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada indikator Ketepatan dalam pengelolaan pengumpulan sampah sudah baik yang mana dalam pengumpulan sampah sudah efektif di Kecamatan Bukit Raya sedangkan kendala dalam pengolahan sampah saat ini ketidak sesuaiannya adalah dalam kinerja persampahannya dan juga kurang kerjasama masyarakat sehingga jumlah volume sampah selalu meningkat setiap tahunnya dan masih kurang sadar masyarakat terhadap persampahan.

### **5.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan faktor penghambat terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adapun hambatan tersebut antara lain :

1. Masih kurang ketersediaan tempat kapasitas TPS sehingga dengan cepatnya tempat TPS penuh.
2. Masih banyak pemungutan anggaran kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan juga dengan kecukupan area persampahannya kurang untuk membuang sampah.
3. Dalam pemanfaatan anggaran juga merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, tanpa adanya dukungan anggaran tidak dapat berjalan lancar.
4. kurangnya partisipasi masyarakat dan pemahaman diri dalam menjaga penanganan sampah.
5. kurangnya tanggapan masyarakat terhadap sampah dan kurangnya kesadaran diri masyarakat dalam menangani sampah disekitar.
6. ketersediaan TPS yang kurang dan juga terdapat peningkatan dalam jumlah volume sampah disetiap tahunnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Maka adapun kesimpulan untuk Dinas Lingkungan



Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan evaluasi kinerja dalam pengolahan sampah maka penulis dapat menarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan sampah kurang efektif dalam memberikan pencapaian dan ketersediaannya TPS cukup dalam menampung sampah, dan proses yang ingin dituju sudah mulai terlaksana dalam menangani pengolahan sampah, dimana ini sangat penting dalam proses pengolahan sampah.
2. Berkenaan bahwa DLHK telah berusaha melakukan kinerja dalam pengolahan sampah dan menimbang yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektif dalam pengolah sampah, tentu di lakukan dengan cukup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menjalankan pengolahan sampah di kecamatan Bukit Raya.
3. Mengenai pelaksanaan pengolahan sampah dalam kebersihan sesuai dengan perwako.pengumpulan sampah yang mana dalam pengumpulan sampah kurang efisien di Kecamatan Bukit Raya dan anggaran ditingkatkan lagi agar memaksimalkan kinerja dalam pengolahan sampah.
4. Dalam pengelolaan pengumpulan sampah sudah efisien dan sudah sesuai dengan UUD di Kecamatan Bukit Raya, dan dalam pemungutan sampah sudah dilakukan secara merata dan dalam partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi dalam penanganan sampah agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

5. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan kinerja pengolahan sampah dapat dilihat dari masyarakatnya, agar dapat memenuhi kebutuhan ideal masyarakat dan nilai harus dari kesadaran masyarakat itu sendiri yang berpartisipasi, dan juga dukungan dari masyarakat sangat penting agar masalah dalam pengolahan sampah berjalan dengan lancar.
6. Dengan ketersediaan TPS di beberapa titik memudahkan dalam proses pengolahan sampah dan berjalan dengan baik, dan juga terdapat petugas khusus dalam pengambilan sampah sehingga memudahkan masyarakat dalam membuang sampah, dan agar volume sampah juga bisa berkurang dengan seiring berjalannya waktu.

### 1.2 Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kecamatan Bukit Raya dalam pengembangan Evaluasi kinerja pengolahan sampah terkait upaya pengurangan sampah harus adanya dukungan dan kerjasama antar masyarakat sehingga pengolahan sampah tetap terjaga dan mencapai tujuan bersama.
2. Meningkatkan sosialisasi dan partisipasi tidak hanya terkait dengan pengolahan sampah anorganik melainkan sampah organik dengan berbagai metode salah satunya dengan konsep 3R.
3. Mengoptimalkan anggaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan pengolahan sampah dan tempat area TPS yang lebih luas

karena banyak kegiatan yang melibatkan dana agar sesuai dengan yang dibutuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Daniel, Yanuar 2009, Sampah dan Manajemen Persampahan, Yayasan  
Obor Jakarta.



- Hussein Arifim. 2003. Manajemen Pengelolaan Sampah. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Suprihatian, Aprihanto D. Gelbert M. 1999. Sampah dan Pengelolaannya, Malang.
- Fahrudin, Adi. Ph. D. 2011. Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Buku Pendidikan-Anggota IKAP
- Nugroho, Riant D, Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003
- Nur Rahmawati Sulistiyorini, Rudi Saprudin Darwis, dan Arie Surya Gutama, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu, Kelurahan Cicurug
- Darmadi, Abu. 2002. 1996. Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Manajemen Bina. Cipta: Bandung
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2011. Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta
- Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004).
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Hadiwiyoto, S. 1983. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: Yayasan Idamayu.
- Hartono, R. 2008. Penanganan dan Pengolahan Sampah. Bogor: Penebar Swadaya.

- Azwar dan Asrul. 1990. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Mutiara Sumbr Widya.
- Wibowo, A dan Djajawinata, D.T. 2004. Penanganan Sampah Perkotaan.
- Suprihatin, 1999 Sampah dan Pengelolaannya. Buku Panduan Pendidikan dan Latihan. Malang.
- Dr. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si, 2011 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. Ilmu Pemerintahan, (PT. Bumi Aksara : Jakarta, 2014).
- Ndraha, Thaliziduhu. 2003. Teori Budaya Organisasi. Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Thaliziduhu 2010. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Thaliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2. PT Rineka Cipta, Jakarta
- C.F. Strong. 2004. Konstitusi-konstitusi Politik Modern-Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia. Nusa Media : Jakarta.
- Van Poelje, G.A., Prof. Dr., 1959. Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan. Jakarta : NV Soroengan.
- Syafiie, Inu Kencana 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung
- Musanef, 2000. Pemerintah di Indonesia. Gunung Agung, Jakarta

Labobo, Muhadam 2006. Memahami Ilmu Pemerintah (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Labobo, Muhadam 2011, Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian Teori Konsep, dan Pengembangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Koryati, Nyimas DKK 2005. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah, YPAPI, Yogyakarta

Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Nugroho, Riant. 2004. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. Rineka Cipta. Jakarta

Riplay dan Franklin dkk, 2008. Kebijakan Publik, Jakarta : Inter Media

Sugiyono 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Grasindo

Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Gaung Persada Press

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007.



- Moleong, L, J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Indiahono, D. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Yogyakarta : Gafa Media.
- AG Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyawati. 2012, Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
- Mahsun, Mohamad, 2011. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Dunn, William. 1999. Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, Ma DKK. Jakarta.
- Arikunto, 2004, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, Edisi Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gaouzali, Saydam. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Mikro). Jakarta : Djambatan.
- Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses, (Edisi Revisi), Yogyakarta : Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Dye, Thomas R., 1992. Understanding Public Policy. New Jersey : Englewood Cliffs.

Silalahi, Uber. (2010). Metode Penelitian Sosial, PT. Refika Aditama, Bandung.

Husaini, Usman. 2009. Metodologi Penelitian Sosial Jakarta : Bumi Aksara.

Krisyanto, Rachmat 2007. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta : Kencana Prenada Group.

Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang : IKIP

Spradley, J. P. 1997. Metode Emografi. Terjemahan oleh Misbah Yulfa Elisabeth. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya.

#### **B. Jurnal**

Mohammad Rendy, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertanahan Kota Palu, Fakultas Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako Volume 3 Nomor 11, November 2015.

Muchammad Zamzami Elamin, Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, Fakultas Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga Volume 10 Nomor 4, Oktober 2018.

Mohammad Rizal, Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala), Volume 9 Nomor 2, Mei 2011

Nur Rahmawati Sulistiyorini, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug, Volume 5 Nomor 1.

Dilva Ramadhan, Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R Tahun 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 6, 2 Juli-Desember 2019.

Hildawati, Evakuasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Kota Dumai (Studi Pasca Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Di Bidang Persampahan), Volume 5 Nomor 1, Tahun 2018.

Akib, H., Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Volume 1 Nomor 1, Tahun 2010.

### **C. Dokumentasi**

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Bab 1 pasal (1) ayat 3 dan pasal (2) Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Fungsi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah.



Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010

Tentang Pedoman Pengolahan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 (Pasal 5), Tugas

Pemerintah Daerah Dalam Pengolahan Sampah.

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 48 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola

Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 134 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Sampah.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Nomor Urut 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Bab IV Pasal 4 Tentang Tugas Dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.